

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	30
1.3 Tujuan Penelitian	30
1.4 Manfaat Penelitian	31
1.5 Sistematika Penulisan	32
BAB II	34
TINJAUAN PUSTAKA	34
2.1 Tinjauan Teori.....	34
2.1.1 Teori Sistem Hukum	34
2.1.2 Teori Tujuan Hukum.....	36
2.2 Tinjauan Konseptual.....	41
2.2.1 Konsep Penguasaan Negara Atas Kekayaan Alam	41
2.2.2 Konsep Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.....	45
2.2.2.1 Konsep Masyarakat Hukum Adat.....	51
2.2.2.2 Konsep Asal-Usul Keaslian Tanah Ulayat	53
2.2.2.3 Konsep Pengaturan Hukum Adat Atas Tanah Ulayat ...	55
2.2.2.4 Konsep Pengakuan Negara Atas Tanah Ulayat	60
2.2.3 Konsep Proyek Strategis Nasional Migas	63
2.2.4 Konsep Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Prinsip Kekeluargaan.....	64
BAB III	68
METODE PENELITIAN	68
3.1 Jenis Penelitian.....	70
3.2 Jenis Data.....	70
3.3 Cara Perolehan Data.....	74

3.4 Jenis Pendekatan.....	74
3.5 Analisa Data.....	75
BAB IV.....	77
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	77
4.1 Hasil Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Pertanahan Proyek Strategis Nasional Migas Teluk Bintuni.....	77
4.1.1 Kedudukan Hukum Proyek Strategis Nasional Migas Teluk Bintuni.....	77
4.1.2 Permasalahan Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat	85
4.1.3 Solusi Hukum Terhadap Masalah Pertanahan Untuk Proyek Strategis Nasional.....	90
4.2 Pengaturan Hukum Yang Berlaku Bagi Pelepasan Tanah Ulayat Suku Sumuri Bagi Kepentingan Pembangunan PSN Migas Teluk Bintuni	96
4.3 Pendekatan Dalam Upaya Pelepasan Tanah Ulayat Suku Sumuri Berdasarkan Pengaturan Hukum Yang Berlaku.....	110
BAB V.....	119
KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perpindahan Kawasan Industri Terpadu dari Kabupaten Teluk Bintuni Ke Kabupaten Fakfak.....	2
Gambar 1.2	Data olahan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019, 2021, dan 2022.....	6
Gambar 1.3	Sebaran Isu Utama Suku Sumuri berdasarkan Kampung.....	23
Gambar 1.4	Sebaran Marga di Kabupaten Teluk Bintuni.....	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data olahan laporan PNBP 2017 - 2022, Kementerian Keuangan.....	5
Tabel 1.2	Data olahan laporan PNBP SDA Migas 2017 - 2022, Kementerian Keuangan.....	5
Tabel 1.3	Profile masyarakat sumuri, jika dilihat dari aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Kesehatan masyarakat, Pendidikan, hukum, dan keamanan.....	16
Tabel 1.4	Isu Pelepasan Tanah Ulayat yang menjadi tantangan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Migas di Teluk Bintuni.....	18
Tabel 1.5	Kegiatan Land Acquisition and Resettlement Plant report yang dilakukan oleh BP Tangguh di di kurun waktu 1999 sampai 2009.....	20
Tabel 1.6	Dampak atas relokasi terhadap masyarakat sekitar atas pembangunan LNG Tangguh 20 Tabel 1.1 Data olahan laporan PNBP 2017 - 2022, Kementerian Keuangan.....	22
Tabel 4.1	Profil Proyek Pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Bintuni berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.....	80
Tabel 4.2	Ruang Lingkup proyek pengembangan KIT Teluk Bintuni.....	81
Tabel 4.3	Stakeholder mapping untuk proyek pengembangan KIT Teluk Bintuni.....	84
Tabel 4.4	Regulatory Impact Assessment (RIA), konsepsi skema yang dapat dipetakan dalam pengaturan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat Untuk Proyek Strategis Nasional Migas Teluk Bintuni...	104
Tabel 4.5	Persandingan Perbub No Nomor 1 Tahun 2019 dan Perbub Nomor 15 Tahun 2023.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto-foto kegiatan AMDAL, sosialisasi pelepasan Tanah Hak Ulayat, dan pembahasan Perbub Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pemanfaatan Untuk Pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.....	127
------------	--	-----

